

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi secara global dipengaruhi oleh berbagai dinamika yang terjadi, termasuk faktor sosial dan ekonomi yang saling terkait. Pertumbuhan ekonomi dunia dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketidakstabilan politik global, kebijakan perdagangan internasional yang berubah-ubah, fluktuasi harga komoditas, serta dampak pandemi COVID-19. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian yang memengaruhi investasi, perdagangan, dan konsumsi di berbagai negara (Sembiring & Abdiyanto, 2025). Saat ini, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai salah satu indikator utama yang menunjukkan keberhasilan pembangunan suatu negara. Pertumbuhan tersebut menjadi tolak ukur penting dalam menilai pencapaian perekonomian. Tidak dapat disangkal bahwa tingkat kesejahteraan sebuah bangsa sangat bergantung pada kemampuan negara tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan (Marcal, et al., 2024).

Sejak awal abad ke-20, globalisasi telah menjadi kekuatan utama yang membentuk arah perkembangan ekonomi, sosial, dan politik dunia. Dampaknya tidak hanya menciptakan keterhubungan antarnegara, tetapi juga membuka ruang bagi percepatan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi. Namun demikian, pengaruh globalisasi tidak dirasakan secara merata, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Bagi negara-negara ASEAN, dalam era ini memberikan peluang besar untuk memperluas akses perdagangan internasional dan menarik investasi asing yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional serta menurunkan angka kemiskinan. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi bentuk respons kolektif terhadap tantangan sekaligus peluang yang muncul akibat arus globalisasi tersebut. Melalui integrasi ekonomi regional, negara-negara ASEAN berupaya memperkuat daya saing dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi agar mampu

beradaptasi dengan dinamika pasar global yang semakin kompetitif (Hermana, et al., 2025).

Seperti yang terlihat pada tabel laju pertumbuhan ekonomi beberapa negara di ASEAN berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara ASEAN 2024

Negara	Jumlah (%)
Vietnam	7,09
Phillipina	5,64
Malaysia	5,11
Indonesia	5,03
Singapura	4,39
Brunei Darussalam	2,53

Sumber : Good Stats 2025, BPS 2025.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN pada tahun 2024 menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. PDB Vietnam tumbuh paling cepat di 2024, realisasinya melesat dari proyeksi di kisaran 6%-6.5% . Sementara PDB RI tumbuh sesuai proyeksi di kisaran 4,7%-5,5% (BPS, 2025). Dalam data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Vietnam dan Filipina menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi di ASEAN, sementara Indonesia berada pada posisi menengah dengan pertumbuhan yang stabil. Meskipun tidak tertinggi, capaian Indonesia tetap penting karena berada di atas Singapura dan Brunei, serta mencerminkan ketahanan ekonomi dalam menghadapi dinamika global (Good Stats, 2025).

Negara maju umumnya memiliki fondasi ekonomi yang kuat, ditopang oleh pemanfaatan teknologi modern, sistem pendidikan yang unggul, serta akses yang luas ke pasar global. Hal ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan bahkan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketergantungan pada sektor ekonomi tradisional serta tingkat kemiskinan yang signifikan. Kondisi tersebut

memperlebar ketimpangan global yang kini menjadi perhatian utama dalam berbagai forum internasional, karena tidak hanya menghambat pembangunan di negara berkembang, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dunia (Saefulloh, et al., 2023).

Selain itu, peran lembaga internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semakin krusial dalam upaya mengurangi kesenjangan ekonomi global. Dukungan yang mereka berikan dapat berupa bantuan finansial, teknis, maupun kebijakan bagi negara berkembang. Meski demikian, efektivitas peran tersebut memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Melalui penguatan kerja sama internasional diharapkan lahir solusi yang tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan dalam jangka panjang (Andariyani, 2024).

Indonesia, sebagai negara berkembang, senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya bertujuan menambah pendapatan nasional, tetapi juga memperhatikan pemerataan, pertumbuhan penduduk, serta kualitas sumber daya manusia. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja perekonomian sekaligus menilai keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dilakukan negara (Kurniawan, et al., 2021). Berikut data sepuluh tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tabel 1.2
Jumlah Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Tahun	Jumlah (%)
2015	4,88
2016	5,02
2017	5,07
2018	5,17
2019	5,02
2020	-2,07
2021	3,70
2022	5,31
2023	5,05
2024	5,03

Sumber : Good Stats 2025, BPS 2025.

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar –2,07 persen, yang menjadi capaian terendah dalam satu dekade terakhir. Penurunan tajam ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang melumpuhkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam resesi teknis, meskipun tingkat kontraksi relatif lebih kecil dibandingkan beberapa negara lain, yang menunjukkan adanya ketahanan ekonomi domestik yang masih bertumpu pada konsumsi dalam negeri (BPS, 2021).

Sedangkan pada tahun 2024, Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 tercatat sebesar 5,03 persen. Dari sisi produksi, sektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Lainnya yang meningkat 9,80 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terbesar dicapai oleh Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48 persen. Pada triwulan IV-2024, perekonomian Indonesia tumbuh 5,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y). Dari sisi produksi, sektor Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 11,36 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami peningkatan paling besar dengan

pertumbuhan 7,63 persen (BPS, 2025). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dapat diketahui bahwa perekonomian Indonesia senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini dipengaruhi oleh dinamika kondisi serta iklim ekonomi, baik di tingkat domestik maupun internasional.

Pertumbuhan ekonomi di tingkat Provinsi Jawa Barat, juga menunjukkan dinamika yang beragam. Sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia, Jawa Barat memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, ketimpangan antar wilayah serta perbedaan potensi ekonomi daerah menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota.

Pada tingkat regional, data resmi dari BPS Provinsi Jawa Barat mencatat bahwa ekonomi Jawa Barat pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,95 persen secara kumulatif (*c-to-c*) sedikit melambat dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai 5,00 persen. Perlambatan ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas ekonomi tetap tumbuh, laju pertumbuhannya tidak sekuat tahun sebelumnya. Kondisi tersebut mencerminkan adanya penyesuaian aktivitas ekonomi daerah terhadap dinamika ekonomi nasional maupun global. (BPS, 2025).

Selaras dengan kondisi ekonomi Provinsi Jawa Barat yang pada tahun 2024 mencatat pertumbuhan sebesar 4,95 persen dan menunjukkan kecenderungan melambat dibandingkan tahun sebelumnya, perkembangan ekonomi di tingkat lokal juga mengalami dinamika, khususnya di Kota Cirebon. Kota Cirebon, yang berperan sebagai salah satu simpul aktivitas ekonomi di wilayah timur Jawa Barat, memiliki kontribusi penting terhadap kinerja ekonomi regional. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon mencapai 5,02 persen, angka ini sedikit melampaui capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa di tengah perlambatan ekonomi pada tingkat provinsi, Kota Cirebon masih menunjukkan kemampuan dalam mempertahankan kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih baik (BPS, 2025).

Selain itu, kota ini juga berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat bagian timur-utara sebagai bagian dari kawasan Metropolitan Segitiga Rebana (BPS Pemerintah Kota Cirebon, 2022). Berikut data tingkat laju pertumbuhan ekonomi di kota Cirebon tahun 2015-2024.

Tabel 1.3

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Cirebon

Tahun	Jumlah (%)
2015	5,81
2016	6,09
2017	5,8
2018	6,2
2019	6,29
2020	-0,98
2021	3,05
2022	5,1
2023	5,01
2024	5,02

Sumber : Open Data Jabar 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon 2025.

Dalam konteks Kota Cirebon, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015–2024 sebagaimana terlihat dalam tabel tersebut menunjukkan adanya fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada periode 2015 hingga 2016, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari 5,81 persen menjadi 6,09 persen. Namun, pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 5,8 persen. Selanjutnya, pertumbuhan kembali meningkat pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing menjadi 6,2 persen dan 6,29 persen.

Memasuki tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang cukup tajam hingga mencapai -0,98 persen. Kondisi ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat. Pembatasan aktivitas sosial turut menekan kinerja sektor perdagangan, transportasi, serta industri pengolahan di Kota Cirebon. Pada tahun 2021, perekonomian mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan sebesar

3,05 persen, kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 5,1 persen. Meskipun demikian, pada tahun 2023 dan 2024 pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit penurunan dan cenderung stabil di kisaran 5,01 persen hingga 5,02 persen. Tren ini menunjukkan adanya proses pemulihan (rebound) pasca-pandemi yang didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat. Studi lokal menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi pasca-pandemi di Cirebon sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, investasi daerah, dan belanja pemerintah yang diarahkan untuk mendukung pemulihan UMKM (Kusuma, et al., 2023).

Islam menekankan bahwa pertumbuhan harus mencerminkan nilai-nilai keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat disebut berhasil apabila hanya menghasilkan kemakmuran material tanpa memperhatikan kesejahteraan sosial, pemerataan pendapatan, serta kelestarian lingkungan. Berdasarkan konsep *maqasid al-syari'ah* menurut Al-Ghazali, tujuan utama pembangunan ekonomi adalah menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, setiap aktivitas ekonomi harus selaras dengan nilai-nilai syariah agar mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, serta mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat (Karimah, et al., 2025).

Dalam Al-Qur'an mengajarkan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong dalam kebaikan) dan *'adl* (keadilan) dalam hubungan antarbangsa. Dengan demikian, kerja sama ekonomi yang sehat adalah yang tidak menimbulkan ketimpangan antarnegara, tetapi membawa keberkahan bagi semua pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-A'raf [7]: 96.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَلَكِنَّ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya : Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. QS. Al-A'raf [7]: 96.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keberkahan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh faktor material, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas spiritual dan moral masyarakat. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, Al-Qur'an menegaskan bahwa iman dan ketakwaan menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya kemakmuran yang berkelanjutan. Keberkahan yang dimaksud tidak sekadar berupa peningkatan pendapatan, tetapi mencakup stabilitas sosial, keadilan distribusi, dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara layak. Prinsip ini menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi dalam Islam harus berlandaskan nilai etis dan spiritual, sehingga pertumbuhan yang dicapai tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk kerja sama ekonomi, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, harus dilandasi semangat keadilan dan ketakwaan agar mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata serta keberkahan sebagaimana dijanjikan dalam Al-Qur'an (Malahayatie & Nandawati, 2022).

Sejalan dengan upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi aspek yang sangat penting. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia tersebut adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pendidikan yang berhasil dicapai oleh masyarakat di suatu wilayah. Semakin besar nilai rata-rata lama sekolah, semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Secara umum diasumsikan bahwa peningkatan tingkat pendidikan seseorang akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas diri, baik dari segi pola pikir maupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi dalam modal manusia (*Human Capital*) yang berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga berkontribusi terhadap produktivitas dan pembangunan ekonomi (Jannah & FitrianaSari, 2023).

Berdasarkan data (BPS, 2022), rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan rata-rata jumlah tahun yang ditempuh penduduk dalam

mengikuti pendidikan formal. Secara umum diasumsikan bahwa dalam kondisi yang stabil, angka rata-rata lama sekolah di suatu daerah cenderung tidak mengalami penurunan. Nilai rata-rata lama sekolah digunakan sebagai gambaran untuk menilai tingkat kualitas pendidikan masyarakat pada suatu wilayah (Rahim, et al., 2024).

Tabel 1.4

Rata-rata Lama Sekolah di Kota Cirebon

Tahun	Jumlah (%)
2015	9,76
2016	9,87
2017	9,88
2018	9,89
2019	9,9
2020	10,91
2021	10,12
2022	10,33
2023	10,37
2024	10,53

Sumber : Open Data Jabar 2025.

Berdasarkan data Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tabel diatas tampak adanya kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun secara berkelanjutan. Kenaikan tersebut mengindikasikan adanya perkembangan positif dalam hal akses serta keterlibatan masyarakat terhadap pendidikan formal. Secara konseptual, RLS merepresentasikan rata-rata jumlah tahun pendidikan yang telah diselesaikan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Nilai RLS yang semakin tinggi mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah, yang selanjutnya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (Ni'matuzzahroh & Dani, 2022).

Dalam perspektif Islam, konsep belajar sepanjang hayat telah diajarkan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Menuntut ilmu dipandang sebagai kewajiban bagi

setiap Muslim, sebagaimana tercermin dalam hadis yang menyatakan bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam. Semangat belajar ini dapat dianalogikan seperti energi yang perlu terus diperbarui agar individu mampu berkembang dan meningkatkan kualitas dirinya secara berkelanjutan (Ilyas, 2019).

Menurut Ibn Khaldun, tujuan pendidikan Islam terbagi ke dalam dua orientasi utama. Pertama, orientasi ukhrawi, yakni membentuk pribadi yang taat dan mampu menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah. Kedua, orientasi duniawi, yaitu membentuk manusia yang memiliki kemampuan dan kecakapan dalam menghadapi kehidupan secara optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satu bentuk pemikiran pendidikan yang tercermin dalam hadis adalah kewajiban menuntut ilmu bagi setiap Muslim, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim” (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menjadi fondasi bahwa pendidikan dalam Islam bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban yang memiliki dimensi ibadah dan tanggung jawab sosial. Suharto menyatakan bahwa hadis tersebut telah menjadi dasar normatif dalam pengembangan sistem pendidikan Islam yang menempatkan ilmu sebagai sarana pembentukan kualitas manusia (Rifa'i & Setiawati, 2025).

Menurut Quraish Shihab, tujuan pendidikan Islam adalah membina manusia, baik secara individu maupun kolektif, agar mampu menjalankan perannya sebagai hamba Allah secara optimal. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran spiritual dan tanggung jawab sosial. Sedangkan menurut Ibn Khaldun, tujuan pendidikan Islam terbagi ke dalam dua orientasi utama. Pertama, orientasi ukhrawi, yakni

membentuk pribadi yang taat dan mampu menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah. Kedua, orientasi duniawi, yaitu membentuk manusia yang memiliki kemampuan dan kecakapan dalam menghadapi kehidupan secara optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat (Ramadhani & Anwar, 2026).

Selain rata-rata lama sekolah, faktor konsumsi rumah tangga memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan daya beli masyarakat mencerminkan adanya perputaran ekonomi yang sehat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pola pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Cirebon dapat dijadikan salah satu indikator yang relevan dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi daerah. Konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi besar dalam perekonomian suatu daerah. Konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama yang mencerminkan daya beli masyarakat. Semakin tinggi konsumsi rumah tangga, semakin besar perputaran ekonomi yang terjadi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional (BPS, 2023).

Selain itu, konsumsi rumah tangga berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Ketika masyarakat memiliki daya beli yang baik, konsumsi akan meningkat dan hal ini mendorong permintaan barang serta jasa di pasar. Kondisi ini akan menstimulasi kegiatan produksi dan distribusi yang akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan kata lain, konsumsi rumah tangga menjadi indikator penting untuk melihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi berjalan. Namun, konsumsi rumah tangga juga tidak terlepas dari faktor eksternal seperti inflasi, harga kebutuhan pokok, serta tingkat kemiskinan. Jika harga barang dan jasa meningkat tajam, daya beli masyarakat akan menurun meskipun pendapatan relatif tetap, sehingga menghambat laju konsumsi. Sebaliknya, program pemerintah dalam bentuk subsidi, bantuan sosial, maupun penciptaan lapangan kerja dapat menjaga daya beli masyarakat sehingga konsumsi tetap stabil (Wibowo, 2023).

Dalam konteks Kota Cirebon, konsumsi rumah tangga menjadi salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi daerah. Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan primer hingga sekunder melalui pengeluaran konsumsi akan mendorong aktivitas ekonomi lebih luas. Oleh karena itu, analisis konsumsi rumah tangga sangat penting dilakukan untuk memahami kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi serta hubungannya dengan variabel lain seperti Rata-rata lama sekolah dan tingkat kemiskinan (Sari, et al., 2025). Berikut data jumlah konsumsi rumah tangga di kota Cirebon dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

Tabel 1.5

Jumlah Konsumsi Rumah Tangga di Kota Cirebon

Tahun	Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (Milliar Rupiah)	Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah)
2015	8.695,75	7.007,52
2016	9.451,64	7.430,62
2017	10.727,39	8.136,50
2018	11.918,32	8.735,18
2019	13.115,56	9.368,78
2020	13.072,95	9.290,04
2021	13.576,99	9.568,82
2022	14.900,80	10.043,39
2023	16.279,61	10.520,86
2024	4.334,54	11.011,78

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon 2020, 2025

Secara teori, konsumsi rumah tangga merepresentasikan pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa (primer, sekunder, tersier) dan memang secara kuat dipengaruhi oleh pendapatan disposabel. Pendekatan Keynesian sederhana menyatakan adanya hubungan positif antara pendapatan dan konsumsi—ketika pendapatan naik, konsumsi cenderung meningkat—tetapi literatur modern

menekankan bentuk hubungan yang lebih kaya: selain pendapatan, konsumsi dipengaruhi pula oleh kekayaan, ekspektasi pendapatan di masa depan, akses terhadap kredit, dan faktor distribusi pendapatan. Kajian empiris terkini menunjukkan fungsi konsumsi sering dapat dimodelkan baik dengan spesifikasi Keynesian jangka pendek maupun dengan kerangka *Euler / life-cycle* untuk perilaku inter-temporal konsumsi. Hal ini sejalan dengan data pada tabel, di mana tren peningkatan konsumsi searah dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon. Lebih lanjut, konsumsi rumah tangga juga merupakan komponen terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Konsumsi yang tinggi akan menstimulasi sektor produksi dan distribusi barang dan jasa, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Boug, Cappelen, S. Jansen, & Swensen, 2021).

Namun demikian, faktor-faktor eksternal seperti inflasi, harga kebutuhan pokok, serta kondisi sosial-ekonomi seperti kemiskinan dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli menurun, maka pertumbuhan konsumsi ikut terhambat. Data dari tabel tersebut memperlihatkan kenaikan konsumsi riil (harga konstan) mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan/aktivitas ekonomi lokal kemungkinan besar mendorong pengeluaran rumah tangga; hal ini sejalan dengan temuan studi-studi empiris di konteks Indonesia yang menunjukkan pendapatan, lapangan kerja, dan kebijakan lokal berperan signifikan dalam pola konsumsi rumah tangga. Selain itu, literatur juga menyorot peran ketimpangan pendapatan dan akses kredit sebagai determinan yang dapat memperkuat atau melemahkan respons konsumsi terhadap perubahan pendapatan (Munjayanah & Prasetyo, 2024).

Tren konsumsi rumah tangga di Kota Cirebon selama 2015–2024 menunjukkan peran penting konsumsi sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Analisis ini juga relevan untuk mengaitkan konsumsi dengan variabel lain dalam penelitian, seperti tingkat kemiskinan karena daya beli masyarakat akan berdampak langsung pada kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia (Sari & Rahayu, 2022).

Dalam perspektif Islam, konsumsi dibedakan menjadi dua kategori utama. Pertama, pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan duniawi dan

keluarga, seperti kebutuhan sehari-hari. Meskipun bersifat duniawi, jenis pengeluaran ini tetap memiliki konsekuensi spiritual karena dapat memengaruhi pahala seorang Muslim di akhirat. Kedua, terdapat pengeluaran yang dilakukan semata-mata untuk meraih tujuan *ukhrawi*, yaitu belanja yang diniatkan khusus untuk kepentingan akhirat, seperti sedekah, infak, dan amal kebaikan lainnya.

Tujuan hidup dalam Islam adalah mencapai kebahagiaan yang seimbang, baik secara materi maupun spiritual. Ketika keseimbangan ini tercapai, manusia dapat meraih *farah* (kebahagiaan) dan *maslahah* (kebaikan/kemanfaatan). Prinsip ini sejalan dengan hukum-hukum syariah. Syariah berfungsi sebagai pedoman dalam penetapan aturan kehidupan, termasuk dalam prinsip-prinsip *mu'amalah* bagi manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi. Aturan serta regulasi yang bersumber dari nilai-nilai agama inilah yang menjadi praktik ekonomi Islam. Islam hadir membawa seperangkat petunjuk yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Lima hal utama agama (*ad-dīn*), pengetahuan (*'ilm*), jiwa (*an-nafs*), harta (*al-mal*), dan keturunan (*an-nasl*) menjadi elemen yang dijaga melalui maqasid al-syariah. Dengan demikian, Islam sebagai *way of life* menyediakan aturan yang lengkap bagi manusia, termasuk dalam aspek ekonomi, agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dalam koridor yang membawa keberkahan dan kemaslahatan (Badu, 2024).

Menurut Supatminingsih (2018), pola konsumsi rumah tangga dalam Islam berlandaskan pada prinsip manfaat dan berkah (*falah* = manfaat + berkah). Artinya, konsumsi yang dilakukan seorang muslim tidak semata-mata untuk kepuasan duniawi (*utility*), melainkan harus memberi nilai keberkahan serta manfaat spiritual. Oleh karena itu, rumah tangga muslim dituntut untuk menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dengan tanggung jawab sosial melalui zakat, infak, dan sedekah yang juga termasuk dalam perilaku konsumsi. dalam QS. Al-A'raf ayat 31:

﴿يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ مَعَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳﴾

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”. QS. Al-A’raf ayat 31.

Ayat tersebut menegaskan bahwa konsumsi harus dilakukan secara moderat (*iqtishad*), tidak boros (*israf*), dan tidak kikir (*bukhl*). Dalam konteks ekonomi daerah seperti Kota Cirebon, penerapan prinsip konsumsi Islami berarti masyarakat tidak hanya meningkatkan daya beli, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan nilai moral. Ketika konsumsi dilakukan dengan kesadaran spiritual dan sosial, maka perputaran ekonomi yang tercipta akan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat.

Kemiskinan juga menjadi faktor signifikan yang memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Tingginya tingkat kemiskinan dapat menekan produktivitas masyarakat, mengurangi akses pendidikan, serta memperlemah daya beli. Hal ini pada akhirnya berpengaruh terhadap lambatnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Kota Cirebon sebagai kota berkembang masih menghadapi masalah ketimpangan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan beberapa daerah lainnya di Jawa Barat. Di Kota Cirebon sendiri, angka kemiskinan masih menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi daerah (BPS Kota Cirebon, 2024). Kemiskinan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas tenaga kerja. Di Kota Cirebon sendiri, angka kemiskinan masih menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi daerah (BPS Kota Cirebon, 2024). Berikut data tingkat kemiskinan di kota Cirebon yang telah disajikan dalam sepuluh tahun terakhir.

Tabel 1.6

Tingkat Kemiskinan di Kota Cirebon

Tahun	Jumlah (%)
2015	10,36
2016	9,73
2017	9,66
2018	8,88
2019	8,41
2020	9,52
2021	10,03
2022	9,82
2023	9,16
2024	9,02

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon 2025.

Pada data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Cirebon mengalami fluktuasi dalam rentang waktu 2015 hingga 2024. Awalnya (2015) berada di angka yang tinggi, kemudian secara bertahap turun hingga mencapai titik terendah pada 2019, lalu naik kembali pada masa pandemi (2020–2021), dan setelah itu cenderung menurun perlahan hingga di 2024. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa kondisi struktural ekonomi lokal sangat rentan terhadap guncangan eksternal, terutama krisis atau pandemi, serta menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa hanya jangka pendek tetapi harus adaptif dan berkelanjutan. Penurunan dari 2015 ke 2019 menandakan bahwa selama periode tersebut ada kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Peningkatan belanja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi yang pro-keluarga berperan dalam menekan persentase penduduk miskin di Kota Cirebon (Rohadin & Nurcahyo, 2019).

Kenaikan tajam pada 2020 ke 2021 sangat mungkin dipengaruhi oleh dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap sektor ekonomi lokal (usaha mikro, UMKM, lapangan kerja. Dalam penelitian *Analisis Kemiskinan di Wilayah Kota Cirebon*

yang mencakup Kota Cirebon sebagai bagian wilayah Kota Cirebon oleh (Istiandari 2023), ditemukan bahwa COVID-19 memberikan efek signifikan terhadap kemiskinan (meskipun dalam penelitian itu interpretasi negatif - maksudnya situasi pandemi memperberat kemiskinan). Dengan demikian, kenaikan persentase miskin di tahun-tahun pandemi sejalan dengan temuan empiris lokal tersebut. Setelah masa puncak pandemi, data menunjukkan bahwa persentase kemiskinan mulai menurun kembali dari 2021 ke 2022, kemudian ke 2023 dan 2024. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya pemulihan ekonomi dan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan, meskipun belum mencapai level sebelum pandemi. Hal ini sesuai dengan catatan peneliti di Jurnal Administrasi Negara bahwa meskipun pandemi memberikan tekanan besar, Kota Cirebon mulai pulih dan menurunkan angka kemiskinan secara perlahan lewat kebijakan adaptif (Ramadhana & Sugandi, 2025).

Namun, meskipun persentase kemiskinan turun, beban kehidupan penduduk miskin bisa saja tetap tinggi karena kenaikan harga kebutuhan pokok, inflasi, dan kenaikan garis kemiskinan. Artinya, penduduk yang “keluar” dari kategori miskin persentase belum tentu benar-benar sejahtera - mereka mungkin masih rentan terhadap perubahan ekonomi mendadak. Aspek kedalaman kemiskinan (seberapa jauh pengeluaran mereka dari garis kemiskinan) dan keparahan kemiskinan juga perlu diperhatikan sebagai indikator tambahan (P1 dan P2) sebagaimana yang diukur oleh BPS pada data provinsi dan kota. ((BPS), 2019).

Dalam pandangan Islam, kemiskinan (*al-faqr*) bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga persoalan moral, sosial, dan spiritual yang harus ditangani secara menyeluruh. Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap kaum fakir dan miskin sebagai bentuk kepedulian terhadap keadilan sosial. Allah SWT berfirman dalam QS. *At-Taubah* [9]:60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”. QS. *At-Taubah* [9]:60.

Ayat ini menegaskan bahwa Islam memandang kemiskinan sebagai tanggung jawab sosial bersama yang harus diatasi melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen tersebut bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai sistem ekonomi yang menyeimbangkan distribusi pendapatan dan mencegah penumpukan harta pada kelompok tertentu (Umar, et al., 2025).

Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, pengentasan kemiskinan di Kota Cirebon tidak hanya melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dengan memperkuat nilai-nilai sosial Islam seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat. Melalui sistem zakat, infak, sedekah, dan wakaf, kemiskinan dapat ditekan secara berkelanjutan dengan menciptakan keseimbangan antara kemakmuran material dan kesejahteraan spiritual masyarakat.

Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon selama 2015–2024 memiliki keterkaitan erat dengan variabel rata-rata lama sekolah, konsumsi rumah tangga, dan tingkat kemiskinan. Tingkat konsumsi masyarakat yang menurun atau meningkat akan memengaruhi output daerah. Begitu pula dengan kondisi kemiskinan: semakin rendah tingkat kemiskinan, semakin besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, rata-rata lama sekolah mencerminkan kualitas sumber daya manusia, yang dalam jangka panjang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, hubungan antara ketiga variabel tersebut menunjukkan keseimbangan antara aspek material dan moral dalam pembangunan. Islam tidak hanya menilai kemajuan dari pertumbuhan angka ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial dapat terjamin.

Pertumbuhan ekonomi dalam Islam harus berorientasi pada *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum), di mana peningkatan ekonomi tidak boleh dicapai dengan mengabaikan aspek sosial dan kemanusiaan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas keterkaitan antara rata-rata lama sekolah, konsumsi rumah tangga, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. (Rasnino, et al., 2022) menemukan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin tinggi rata-rata lama sekolah di suatu daerah, maka semakin meningkat pula laju pertumbuhan ekonominya. (Rohadin & Arief Nurcahyo, 2019) menemukan bahwa konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2000–2019. Artinya, semakin tinggi konsumsi rumah tangga, maka semakin meningkat pula pertumbuhan ekonomi. (Huda & Indahsari, 2021) menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah tidak memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan kualitas pendidikan terkadang justru berpotensi meningkatkan angka pengangguran. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan tenaga kerja terdidik untuk menunda bekerja demi mencari upah yang sesuai, sehingga pada gilirannya memberikan dampak negatif terhadap kondisi perekonomian daerah. Sementara itu, penelitian (Sudirman & M. Alhudori, 2018) menemukan adanya hubungan negatif antara konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, berbeda dengan hasil (Ardi Afrizal et al., 2021) yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan pada penelitian yang sama (Rohadin & Arief Nurcahyo, 2019) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Cirebon, di mana peningkatan pengeluaran pemerintah mampu menekan angka kemiskinan.

Kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada pengujian tiga variabel secara simultan, tetapi pada upaya membangun model yang merepresentasikan keterkaitan antara kualitas sumber daya manusia (rata-rata lama sekolah), daya beli masyarakat (konsumsi rumah tangga), dan ketimpangan sosial (tingkat kemiskinan) sebagai determinan pertumbuhan ekonomi daerah yang kemudian dianalisis dengan

landasan normatif Islam melalui penguatan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits yang relevan dengan pendidikan, konsumsi, dan kemiskinan.. Sebagian besar kajian sebelumnya hanya menyoroti hubungan antar variabel secara parsial dan pada tingkat nasional atau provinsi, belum banyak yang menganalisis hubungan simultan antara rata-rata lama sekolah, konsumsi rumah tangga, dan tingkat kemiskinan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di tingkat kota. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung menguji variabel-variabel tersebut secara terpisah atau pada wilayah yang berbeda. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam memahami pengaruh ketiga variabel tersebut secara bersamaan pada konteks daerah yang spesifik seperti Kota Cirebon.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya serta dengan mempertimbangkan rentang waktu sepuluh tahun terakhir, penelitian ini dilakukan untuk memahami dampak jangka panjang dan menangkap tren perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi di Kota Cirebon. Dalam perspektif Islam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan semata, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu mewujudkan *maslahah* (kemaslahatan) bagi masyarakat melalui keseimbangan antara kemajuan material dan kesejahteraan spiritual sebagaimana tertuang dalam prinsip *maqasid al-syari'ah*, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, isu-isu seperti rata-rata lama sekolah, konsumsi rumah tangga, dan kemiskinan menjadi bagian penting dalam kajian ekonomi Islam karena berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa dan keturunan, perilaku konsumsi yang beretika, serta pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana **“Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah Konsumsi Rumah Tangga, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Di Kota Cirebon Tahun 2015-2024”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam penelitian ini bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon selama periode 2015–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Setelah

mengalami pertumbuhan stabil sebelum tahun 2020, kondisi ekonomi sempat berkontraksi akibat pandemi COVID-19 dan baru mulai menunjukkan pemulihan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon masih belum stabil dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi.

1. Fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon selama periode 2015–2024 menunjukkan adanya ketidakstabilan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, termasuk dampak pandemi COVID-19 serta kondisi globalisasi yang tidak merata.
2. Rata-rata lama sekolah di Kota Cirebon selama periode 2015-2024 cenderung meningkat, namun peningkatan tersebut belum tentu sejalan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan penyerapan lapangan kerja, sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi masih perlu dianalisis lebih mendalam.
3. Pola konsumsi rumah tangga masyarakat Kota Cirebon belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keseimbangan (*tawazun*) dan keberkahan (*barakah*) sebagaimana diajarkan dalam Islam, di mana perilaku konsumsi sering kali dipengaruhi oleh daya beli, inflasi, dan ketimpangan ekonomi.
4. Tingkat kemiskinan yang berfluktuasi dan relatif tinggi dibandingkan beberapa daerah lain di Jawa Barat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum diikuti oleh pemerataan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, serta masih lemahnya implementasi nilai-nilai keadilan distributif dalam perekonomian.
5. Belum adanya penelitian komprehensif yang menganalisis secara simultan pengaruh rata-rata lama sekolah, konsumsi rumah tangga, dan tingkat kemiskinan terhadap laju pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam di Kota Cirebon, padahal ketiga variabel tersebut memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan masalah agar pembahasan tidak melebar ke luar konteks dan tetap fokus pada tujuan utama penelitian. Pembatasan ini juga bertujuan supaya penelitian dapat diselesaikan secara terarah, sesuai rumusan masalah, serta menghasilkan kesimpulan yang tepat. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya membahas mengenai pengaruh rata-rata lama sekolah, konsumsi rumah tangga, dan tingkat kemiskinan terhadap laju pertumbuhan ekonomi dalam Perspektif Islam di Kota Cirebon.
- b. Rentang waktu penelitian dibatasi pada periode 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2015 hingga 2024, sehingga analisis yang dilakukan hanya menggambarkan kondisi dalam kurun waktu tersebut.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu pernyataan atau pertanyaan penelitian yang disusun secara sistematis untuk menggambarkan fokus permasalahan yang akan diteliti. Rumusan masalah berfungsi sebagai pedoman utama agar penelitian tidak melebar ke luar konteks, serta memastikan penelitian tetap terarah pada tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, keberadaan rumusan masalah sangat penting karena menentukan arah penelitian, metode yang digunakan, serta hasil yang akan dicapai. Berdasarkan masalah yang dapat dirumuskan dari identifikasi masalah dan batasan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon pada tahun 2015–2024?
2. Bagaimana Pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap perubahan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon selama periode 2015–2024?
3. Bagaimana Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon pada tahun 2015–2024?
4. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah, konsumsi rumah tangga, dan tingkat kemiskinan terhadap laju pertumbuhan ekonomi ditinjau dari perspektif Islam di Kota Cirebon pada tahun 2015-2024?.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon dengan menitikberatkan pada tiga variabel utama, yaitu rata-rata lama sekolah, konsumsi rumah tangga, dan tingkat kemiskinan. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk melihat bagaimana rata-rata lama sekolah sebagai indikator kualitas pendidikan dan sumber daya manusia berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pada akhirnya berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuannya antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon pada tahun 2015–2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap perubahan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon selama periode 2015–2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon pada tahun 2015–2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh rata-rata lama sekolah, konsumsi rumah tangga, dan tingkat kemiskinan terhadap laju pertumbuhan ekonomi ditinjau dari perspektif Islam di Kota Cirebon pada tahun 2015-2024.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penelitian Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur di bidang ekonomi makro, khususnya yang mengkaji hubungan antara rata-rata lama sekolah, konsumsi rumah tangga, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti lain yang ingin melakukan kajian serupa dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder.

2. Bagi Pemerintah Kota Cirebon

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat

sasaran. Dengan mengetahui pengaruh rata-rata lama sekolah, konsumsi rumah tangga, dan tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat menyusun strategi intervensi yang tidak hanya berfokus pada indikator makroekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan pendidikan bagi masyarakat.

3. Bagi Masyarakat dan pembaca

Bagi masyarakat dan pembaca umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, daya beli, serta kesejahteraan sosial sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, peneliti ini berharap memeberikan manfaat antara lain :

a. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dalam bidang ilmu ekonomi, khususnya kajian ekonomi makro yang mengaitkan faktor sosial dan pendidikan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga dapat memperkuat temuan sebelumnya mengenai pengaruh rata-rata lama sekolah, konsumsi rumah tangga, dan tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang ingin mengembangkan penelitian serupa di masa mendatang.

b. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kota Cirebon dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif, dengan memperhatikan aspek sosial-ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai informasi mengenai pentingnya pendidikan, pola konsumsi, dan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan

dalam memahami hubungan antara kesejahteraan masyarakat dengan perkembangan ekonomi daerah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun untuk memberikan panduan yang jelas terkait alur pembahasan dalam setiap bab. Secara umum, penelitian ini mencakup lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini membahas landasan teori yang berkaitan dengan variabel penelitian, kajian penelitian terdahulu sebagai acuan pengembangan penelitian, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memaparkan jenis dan pendekatan penelitian, sumber serta jenis data yang digunakan, cara pengumpulan data, definisi operasional setiap variabel, serta metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengolahan dan analisis data, interpretasi temuan penelitian, serta pembahasan yang dikaitkan dengan teori dan penelitian sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang diperoleh dari analisis data, serta saran atau rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil penelitian.